



LEMHANNAS RI  
THE NATIONAL RESILIENCE INSTITUTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

# newsletter

Tanhana Dharma Mangrva • edisi 96, Juli 2017



Megawati Soekarnoputri Resmikan **Patung Bung Karno di Lemhannas RI** (hal 06)

**08**

**Delegasi NIPSS** Kunjungi Lemhannas RI

**10**

**RTD Lemhannas RI** Bahas Konflik Laut Cina Selatan

**12**

**Asia Timur** Berpotensi Menjadi Pusat Dunia

## daftar isi

- 2 Halalbihalal Lemhannas RI dalam Rangka Peringatan Hari Idul Fitri 1438 H
- 3 Lemhannas RI Menerima Kunjungan Peserta Pendidikan Kepemimpinan Tingkat III Kementerian Agama RI
- 4 Gubernur Lemhannas: Kompetisi Ideologi Mengaburkan Karakter dan Jati Diri Bangsa
- 5 Gubernur Lemhannas RI Iantik Pejabat Eselon I, II, III dan IV
- 6 Megawati Soekarnoputri Resmikan Patung Bung Karno di Lemhannas RI
- 7 BAMAG Indonesia Lakukan Audiensi mengenai Wawasan Kebangsaan dengan Lemhannas RI
- 8 Delegasi NIPSS Kunjungi Lemhannas RI
- 9 Lemhannas RI Lakukan Diskusi dengan J.P. Morgan
- 10 RTD Lemhannas RI Bahas Konflik laut Cina Selatan
- 11 Lemhannas RI Bahas Tentang Reformulasi Pedoman Kebijakan Negara
- 12 Asia Timur Berpotensi Menjadi Pusat Dunia

## tim redaksi

Pengarah:

**Arif Wachyunadi**

Penanggung Jawab:

**Mindarto**

Redaktur Pelaksana:

**Wahyu Widji Pamungkas**

Penyunting/Editor:

**Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Ni Made Vira Saraswati, Endah Heliana, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Bambang Iman Aryanto**

Fotografer: **Suryadi, Suyono, Dwi Jayanto**

Sekretariat: **Linda Purnamasari, Gatot**

Distribusi: **Supriyono, Ayu Novitasari**

Alamat Redaksi:

**Biro Humas Settama Lemhannas RI,**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109**

Fax. **(021) 3451926**

Website <http://www.lemhannas.go.id>

# Halalbihalal Lemhannas RI dalam Rangka Peringatan Hari Raya Idul Fitri 1438 H



**P**ada Selasa (4/7), Keluarga Besar Lemhannas RI mengadakan halalbihalal dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1438 H di Lapangan Tengah, Lemhannas RI. Halalbihalal tersebut diawali dengan apel pagi dan sambutan dari Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Dalam sambutannya, Agus Widjojo menuturkan bahwa setelah satu bulan menjalankan ibadah puasa, umat muslim Indonesia selalu melakukan halalbihalal sebagai salah satu tradisi Idul Fitri yang telah berlangsung lama di Indonesia. Halal bihalal sendiri, lanjut Agus Widjojo, merupakan ungkapan rasa dan sikap saling memaafkan kesalahan dan kekhilafan pada diri masing-masing.

Maka dari itu, ujar Agus Widjojo, halalbihalal ini mengandung hikmah yaitu menguatnya kembali akhlak, moral, etika yang baik serta meningkatkan kinerja guna mengantisipasi dan menjawab berbagai tantangan tugas maupun tanggung jawab di masa depan.

Berkaitan dengan tradisi halalbihalal, Agus Widjojo mengatakan bahwa di negara lain seperti Arab, tradisi saling meminta maaf justru dilakukan saat menyambut datangnya bulan Ramadan. Tradisi-tradisi yang berbeda ini, lanjut Agus Widjojo, memiliki masing-masing alasan yang dapat diterima.

Acara halalbihalal tersebut dilanjutkan dengan acara inti yaitu saling bersalaman dan bermaafan antar seluruh pejabat dan staf Lemhannas RI dan ditutup dengan makan bersama. ●

# Lemhannas RI Menerima Kunjungan Peserta Pendidikan Kepemimpinan Tingkat III Kementerian Agama RI



**T**iga puluh orang peserta dari pendidikan kepemimpinan tingkat III Kementerian Agama RI mengunjungi Lemhannas RI pada hari Kamis (13/7). Kunjungan dalam rangka program kursus tersebut diterima di ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lt IV, Lemhannas RI dan disambut oleh Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi Kolonel Laut (KH) Drs. Hendrawan Setiadi M.Si.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Implementasi *Short Course* selaku Pemimpin Delegasi Aden Daenuri dalam sambutannya mengatakan bahwa program kursus ini tidak terlepas dari agenda pembelajaran wawasan nasionalisme.

Aden Daenuri mengharapkan para peserta dapat lebih mengenal tugas dan fungsi Lemhannas RI dan terinspirasi oleh materi yang dipresentasikan oleh pembicara. Presentasi dari narasumber, lanjut Aden Daenuri diharapkan dapat membantu peserta dalam merancang proyek perubahan

sehingga bisa dilaksanakan dengan baik.

Tenaga Ahli Profesional Bidang Politik Kisnu Haryo, S.H., M.A. yang hadir sebagai narasumber menjelaskan bahwa wawasan nasional adalah cara pandang tentang kehidupan bernegara yang berdasarkan pada Empat Konsensus Dasar Nasional.

Lanjut Kisnu Haryo, mempelajari wawasan nasional bertujuan untuk membangun karakter bangsa dan juga mengetahui sistem nasional dalam mengelola kehidupan negara.

Dalam paparannya, Kisnu Haryo juga menyampaikan harapannya agar para peserta dapat menjadikan wawasan nasional sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tempat kerja.

Diskusi ditutup dengan pemberian *souvenir* dan sesi foto bersama kemudian dilanjutkan dengan kunjungan singkat ke Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional di Lemhannas RI. ●

# Gubernur Lemhannas: Kompetisi Ideologi Mengaburkan Karakter dan Jati Diri Bangsa



**M**enguatnya politik identitas menyebabkan ruang dialog kebangsaan seakan tertutup, demikian disampaikan Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Upacara Peringatan HUT Lemhannas RI ke-52 pada Rabu (24/5). Lebih lanjut, Agus Widjojo menyampaikan bahwa kompetisi ideologi telah mengaburkan karakter dan jati diri bangsa sehingga konsensus dasar bangsa seakan diabaikan.

Oleh karenanya, Lemhannas mengajak segenap lapisan masyarakat, dari kalangan elit hingga akar rumput, untuk tetap menjaga karakter dan jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran dan pemahaman bahwa Indonesia lahir dengan kemajemukan sehingga dialog, tukar pikiran, dan interaksi antar saudara sebangsa yang berbeda perlu dibudayakan. Setiap warga negara Indonesia harus cerdas dalam menyikapi berbagai isu

negatif agar tidak mudah terprovokasi dan terjebak dalam narasi yang memecah persatuan dan kesatuan.

Peringatan HUT ke-52 tahun ini, Lemhannas RI mengangkat tema “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional, Lemhannas RI Bertekad Meneguhkan Kembali Kehidupan Kebangsaan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Melalui tema tersebut, dan berpedoman pada semangat kebangkitan nasional, Lemhannas mengajak dan menyerukan kepada berbagai komponen bangsa di berbagai tatanan kehidupan sosial politik, untuk memahami dan meneguhkan kembali empat konsensus dasar bangsa yang dirintis oleh para pendiri bangsa.

Bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional, Lemhannas RI diresmikan oleh presiden pertama Ir. Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965. Peresmian ini mendedikasikan Lemhannas untuk berperan dalam memelihara semangat kebangkitan dan keutuhan bangsa Indonesia. ●

# Gubernur Lemhannas RI Lantik Pejabat Eselon I, II, III dan IV



**G**ubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melantik 18 pejabat Lemhannas RI di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra Lantai I, pada Selasa (30/5).

Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan proses regenerasi di Lemhannas RI. Proses regenerasi tersebut, lanjut Agus Widjojo, bukan hanya sebuah proses alamiah namun juga wujud implementasi konstruktif atas sistem pembinaan personel dan organisasi yang bertujuan menghadirkan Lemhannas RI yang kredibel dan akuntabel dihadapan seluruh *stakeholder*.

Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan beberapa pesan bagi para pejabat yang baru saja dilantik. Bagi pejabat yang dilantik menjadi Tenaga Ahli Pengajar dan Tenaga Ahli Pengkaji yang setara dengan Eselon I-A Agus Widjojo berpesan bahwa para pejabat tidak hanya dituntut kapabel dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun juga harus menjaga integritas diri.

Di sisi lain, lanjut Agus Widjojo, para pejabat yang dilantik sebagai Kepala Biro dan Direktur yang merupakan Eselon II dituntut menghadirkan berbagai gagasan solutif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan unit kerja sehingga menghasilkan output yang optimal dan memberikan dampak baik pada *outcome* lembaga.

Kemudian, Agus Widjojo juga berpesan kepada pejabat Eselon III agar selalu kreatif dan inovatif serta responsif terhadap dinamika kebutuhan dalam menjalankan pengelolaan kegiatan di Unit Kerja. Sementara bagi para pejabat Eselon IV Agus Widjojo berpesan, agar mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan kegiatan.

Selain melantik para Pejabat, Agus Widjojo juga melepas 6 Pejabat Lemhannas RI. Kepada pejabat yang dilepas, Agus Widjojo juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pemikiran dan pengabdian selama menjabat.

Menutup sambutannya, Agus Widjojo menyampaikan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru saja dilantik. ●



# Megawati Soekarnoputri

## Resmikan Patung Bung Karno di Lemhannas RI

**B**ertempat di Halaman depan Lemhannas RI, Megawati Soekarnoputri meresmikan Patung Bung Karno pada Rabu (24/5). Peresmian tersebut merupakan salah satu Rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Lemhannas RI yang ke-52 yang juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei yang lalu.

Pada Peresmian yang dibuka dengan Tarian Bali Sri Kamewali ini, Megawati Soekarno mengatakan bahwa tujuan Presiden Soekarno mendirikan Lemhannas RI yaitu untuk mengumpulkan para calon pemimpin bangsa

dari seluruh Indonesia. Para calon pemimpin bangsa tersebut harus dibekali dengan ilmu Geopolitik agar memahami hakikat bangsa Indonesia.

Geopolitik, menurut Megawati, adalah ilmu yang baru bagi Indonesia. Geopolitik sebenarnya adalah ilmu yang mengajarkan kesadaran akan posisi Indonesia di dunia. Jika tidak mengetahui posisi Indonesia di dunia, rakyat Indonesia akan menyebut diri sebagai orang Indonesia namun tidak berperilaku seperti orang Indonesia. “Sebab, kalau kita tidak tahu di mana posisi Indonesia, maka kita akan berpikir bahwa bangsa Indonesia bukan apa-apa. Badan kita menyebut orang

Indonesia, tetapi cara berpikir kita ikut orang luar,” jelas Megawati.

Jika rakyat Indonesia mengetahui Geopolitik, lanjut Megawati, Indonesia dapat mengatur strategi masa depan untuk meraih kejayaan Indonesia. Maka dari itu, Hakikat Lemhannas harus dikembalikan kepada rohnya. Sehingga nantinya para calon pemimpin Bangsa yang telah menempuh pendidikan di Lemhannas RI akan memahami ilmu geopolitik.

Mengenai sosok Bung Karno, Megawati mengatakan bahwa semasa hidup, Proklamator Kemerdekaan Indonesia tersebut telah menerima 23 gelar *Honoris Causa* dari Universitas dalam maupun luar negeri dalam berbagai bidang keilmuan seperti politik, hukum, sosial, dan budaya. Seharusnya kita mempelajari sosok Bung Karno yang mampu memerdekakan Bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, Megawati memaparkan bahwa Bung Karno adalah sosok yang suka membaca. Kumpulan-kumpulan pikiran Bung Karno, lanjut Megawati, harus dengan berani dibuka untuk dipelajari agar dapat melihat bagian yang relevan masih dapat digunakan karena Bung Karno adalah sosok yang *visioner*.

Sebelum menutup pidatonya, Megawati mengatakan bahwa Lemhannas RI harus dapat menjadi sebuah alat perjuangan bagi bangsa dan negara bukan bagi kelompok dan perorangan.

Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa pada saat memberikan kuliah umum pertama yang berjudul “Geopolitik” bagi peserta Pendidikan Reguler Angkatan pertama se usai meresmikan Lemhannas RI, Bung Karno mengatakan bahwa orang tidak akan bisa membangun bangsa dan negara yang kuat jika tidak mengetahui ilmu geopolitik. Hal tersebut, lanjut Agus Widjojo, dapat diartikan bahwa jika ingin memiliki ketahanan nasional yang kuat, harus mempelajari ilmu geopolitik. Dengan ilmu geopolitik, Bangsa Indonesia dapat membawa Indonesia pada tujuan nasionalnya.

Selain itu, Bung Karno juga berpesan bahwa sangat penting bagi para calon pemimpin Indonesia untuk belajar memahami jati diri bangsa yang bersumber dari empat Konsensus Dasar Bangsa. Ketiga, Bung Karno menyampaikan bahwa pemimpin Indonesia dalam belajar mengenai pertahanan tidak hanya belajar mengenai “bedil dan mesiu” tetapi juga harus mempelajari pengetahuan multikompleks menyangkut masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, demografi, geografi, serta demografi. “Tiga poin tersebut terdapat dalam kurikulum pendidikan di Lemhannas RI,” pungkas Agus Widjojo.

Hadir dalam peresmian tersebut Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Guruh Soekarnoputra, Sukmawati Soekarnoputri, dan mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol Arif Wachyunadi, serta seluruh Pejabat dan staf Lemhannas RI. ●

## BAMAG Indonesia Lakukan Audiensi mengenai Wawasan Kebangsaan dengan Lemhannas RI



Jajaran Badan Musyawarah Gereja (BAMAG) Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum BAMAG Indonesia Agus Susanto melakukan kunjungan ke Lemhannas RI dalam rangka melakukan audiensi pada Jumat (7/7). Kunjungan tersebut diterima oleh Direktur Program dan Pengembangan Pemantapan Brigjen Pol Drs. Rafli, SH. Mewakili Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Ruang Rapat Kedeputusan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Gedung Astagatra Lantai IV, Lemhannas RI.

Dalam kunjungan tersebut, Agus Susanto mengatakan bahwa BAMAG Indonesia adalah kumpulan berbagai gereja Kristen yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia. Agus Susanto mengatakan bahwa saat ini, terdapat kebutuhan mengenai pemahaman keindonesiaan secara massal bagi para pendeta dan pemuda yang tergabung di BAMAG Indonesia.

Hal tersebut, lanjut Agus Susanto, disebabkan oleh banyaknya berita “hoax” yang beredar di media sosial dan menjadi salah satu penyebab hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap keindonesiaan. Agus Susanto menyebutkan bahwa gereja-gereja di pelosok Indonesia yang tergabung dalam BAMAG melihat hal tersebut sebagai salah satu ancaman yang dapat memecah belah persatuan Indonesia.

Maka dari itu, Agus Susanto berharap para pemimpin gereja dan pendeta untuk dapat mengikuti Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI agar sebagai pemuka agama mereka dapat menyebarluaskan wawasan kebangsaan tersebut kepada umat yang merupakan bagian dari masyarakat hingga ke pelosok daerah.

Menanggapi baik hal tersebut, Rafli mengatakan bahwa Program Pemantapan yang dilakukan oleh Lemhannas RI bukanlah pendidikan yang bersifat “menggurui” namun bersifat “menggugah” kembali nilai-nilai kebangsaan. Rafli juga menjelaskan mengenai berbagai program pemantapan yang ada di Lemhannas RI dan program yang dapat diikuti oleh para pemimpin gereja dan pendeta di BAMAG Indonesia. Audiensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi mengenai Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan secara lebih dalam. ●

# Delegasi NIPSS Kunjungi Lemhannas RI



**B**ertempat di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra Lt. I, Lemhannas RI pada Rabu (14/7), Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjono menyambut kedatangan delegasi NIPSS (*National Institute of Policy and Strategic Studies*) Nigeria yang dipimpin oleh Jonathan Mela Juma yang sekaligus melakukan *Courtesy Call*.

Usai *Courtesy Call*, delegasi NIPSS melanjutkan kegiatan diskusi yang dilaksanakan di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra Lantai III, Lemhannas RI. Diskusi diawali dengan pemutaran video profil Lemhannas RI. Kemudian Deputy Pengkajian Strategik, Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. menjelaskan mengenai geografi, demografi, dan kekayaan alam Indonesia.

Indonesia, jelas Djagal Wiseso, merupakan negara yang memiliki letak geografis yang strategis. Hal tersebut karena Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudera. Di ASEAN, Indonesia juga merupakan negara terbesar sehingga Indonesia harus menunjukkan perannya untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah regional seperti salah satunya isu tiga pilar.

Dari segi geografis, Indonesia memiliki 17 ribu pulau dengan luas 2 juta km yang meliputi darat dan laut. Indonesia, lanjut Djagal, juga memiliki 3 Alur Laut Kepulauan. Maka dari itu, lanjut Djagal Wiseso, Indonesia tidak hanya memiliki posisi

strategis dan juga lokasi yang strategis.

Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan berbagai kekayaan budaya, suku, adat istiadat, dan bahasa daerah. Namun, jelas Djagal Wiseso, Indonesia hanya memiliki satu bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia.

Jika dilihat dari kekayaan alamnya, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki sumber daya melimpah. Sementara dari segi maritim, Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman seperti *piracy* dan *illegal fishing*. Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi masalah terkait dengan ZEE di Kepulauan Natuna yang turut masuk dalam *nine-dashed line* Laut Cina Selatan serta *illegal fishing* yang banyak terjadi di daerah tersebut.

Djagal Wiseso juga memaparkan mengenai *Fragile States Index* di tahun 2016. Mengetahui *Fragile States Index* adalah hal yang diperlukan sebelum mengkaji mengenai teknologi agrikultur. Berdasarkan *Fragile States Index* selama 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan dalam pembangunan.

Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dengan para peserta diskusi yang terdiri dari delegasi NIPSS Nigeria dan peserta PPRALVI.

Hadir dalam diskusi tersebut adalah Prof. Dadan Umar Daihani selaku Moderator, Kepala Biro Humas, Tenaga Ahli serta beberapa Pejabat Struktural Lemhannas RI. ●



# Lemhannas RI Lakukan Diskusi dengan J.P. Morgan



**D**elegasi J.P Morgan yang diwakili oleh Sharad Desai yang merupakan wakil dari JP Morgan Asia Pasifik dan perwakilan JP Morgan Di Jakarta Sony Hassan mengunjungi Lemhannas RI dan disambut oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Kamis (19/6). Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi di Ruang Nusantara II, Gedung Trigatra Lantai I, Lemhannas RI.

Dalam diskusi tersebut, Agus Widjojo menyampaikan selamat datang kepada delegasi JP Morgan. Agus Widjojo juga menjelaskan secara singkat mengenai tugas Lemhannas RI yaitu melaksanakan pendidikan bagi para calon pemimpin bangsa, melakukan pementapan nilai-nilai kebangsaan bagi berbagai kalangan, dan melakukan pengkajian strategik.

Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan bahwa Lemhannas RI bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Agus Widjojo berharap diskusi ini dapat memberikan hasil positif kepada kedua pihak.

Sharad Desai dalam diskusi mengatakan bahwa JP Morgan serta Franklin Templeton Investments telah berinvestasi di Indonesia selama 14 tahun sejak tahun 2003 hingga saat

ini. Investasi yang telah dilakukan oleh Franklin Templeton Investment di Indonesia hingga tahun 2017 ini termasuk investasi yang sukses dan juga merupakan investasi jangka panjang.

Disampaikan pula oleh Sharad Desai bahwa ia ingin mengetahui gambaran perubahan kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat Indonesia, mulai awal era demokrasi 2003 hingga sekarang. Ia juga ingin mengetahui apakah perubahan itu mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Tenaga Profesional Bidang Ekonomi, Dr. Rosita S. Noor menekankan bahwa, terkait dengan kondisi politik nasional yang berpengaruh pada sisi ekonomi, Indonesia tetap menjadi tempat terbaik untuk berinvestasi. Sementara Agus Widjojo menyampaikan bahwa tidak ada batas yang jelas antara politik dan ekonomi. Maka, yang diharapkan adalah adanya perkembangan dari kebijakan ekonomi pemerintah.

Hadir dalam diskusi tersebut adalah Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, S.E., M.S., D.E.A., Prof. Dr. Miyasto, S.U., Dr. Panutan Sakti Sulendrakusuma, S.E., M.T., Akt., Mayjen TNI Ivan Ronald Pelealu, S.E., M.M., Brigjen TNI Sudjari, S.I.P. M.Si., dan Brigjen TNI Mindarto. ●



## RTD Lemhannas RI Bahas Konflik Laut Cina Selatan

**T**erkait dengan putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA), Lemhannas RI menggelar *Roundtable Discussion* (RTD) di Ruang Kresna, Gedung Astagatra Lantai IV, Lemhannas RI pada Kamis (8/7). RTD yang mengangkat judul “Strategi Indonesia Menjaga Stabilitas Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) Pasca Putusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) 12 Juli 2016 Guna Perdamaian Regional dalam Rangka Ketahanan Nasional” ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Dalam RTD yang didahului dengan laporan Deputi Pengkajian Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr. tersebut, Agus Widjojo mengatakan saat ini terdapat dua klaim dari pihak yang bertikai di konflik Laut Cina Selatan. Di satu sisi, Tiongkok mengklaim Laut Cina Selatan dengan 9 Garis Putus-Putusnya (*Nine-Dashed Line*) sedangkan di sisi lain adalah klaim pihak lain yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina. Namun, keputusan PCA untuk memenangkan pihak Filipina tidak dapat menyelesaikan konflik tersebut. Agus Widjojo mengatakan bahwa hal tersebut akan menyebabkan instabilitas regional. Maka dari itu, RTD ini dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan terkait dengan masalah tersebut.

Dalam RTD yang dimoderatori oleh Tenaga Profesional Bidang Strategi dan Hubungan Internasional Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Marsda TNI (Purn) Ir. Beng Tardjani, M.Sc. menyampaikan laporan hasil kajian sementara. Beng Tardjani mengatakan bahwa pokok-pokok persoalan LCS adalah persoalan sengketa kedaulatan negara, sengketa zona wilayah maritim akibat adanya klaim sepihak *nine-dashed line* Pemerintah Tiongkok, Sikap keras dan tegas Tiongkok menolak putusan PCA

yang memenangkan gugatan Pemerintah Filipina, fakta klaim *nine-dashed line* Tiongkok yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Maka dari itu, Indonesia harus merumuskan kebijakan, strategi, dan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Pembicara pertama pada RTD ini, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN mewakili Menteri Luar Negeri RI Jose Antonio M. Tavares menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan karena sebenarnya tidak ada ketumpang tindihan antara ZEE dengan *Nine-Dashed Line* Tiongkok. Selain itu, Jose Antonio juga menjelaskan bahwa *Nine-Dashed Line* Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang tegas.

Di sisi lain, Pembicara kedua Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan M. Zulfikar Mochtar, S.T., M.Sc. memaparkan mengenai kekayaan perairan di sekitar Natuna yang mendorong ketertarikan kapal asing untuk masuk ke wilayah tersebut. Kekayaan Natuna tidak hanya dalam hal sumber daya perikanan namun juga minyak dan gas. Dari fakta yang telah dihimpun di Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa dari 300 kapal asing ilegal yang telah ditangkap, setengah dari jumlah tersebut ditangkap di perairan Natuna.

Diskusi tersebut kemudian dilanjutkan dengan dua paparan narasumber lain mengenai strategi Indonesia untuk menjaga stabilitas setelah adanya PCA oleh Asrena Kasal Laksda TNI Tri Wahyudi Sukarno, S.E., M.Sc. dan Marsekal TNI Hadi Tjahyanto, S.IP serta tanggapan dari 4 penanggap.

Hadir dalam RTD tersebut adalah Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.H., M.M., Sekretaris Utama Komjen Pol Arif Wachyunadi, para Tenaga Ahli Lemhannas RI serta Pejabat Struktural Lemhannas RI. ●

# Lemhannas RI Bahas Reformulasi Pedoman Kebijakan Negara



**R**abu (12/7), Kedeputusan Pengkajian Strategik Lemhannas RI menggelar *Roundtable Discussion* yang berjudul “Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara Guna Memperkokoh Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam rangka Ketahanan Nasional” di Ruang Krisna, Gedung Astagatra Lantai IV, Lemhannas RI.

Sebelum diskusi dimulai, RTD tersebut diawali dengan laporan Deputi Pengkajian Strategik Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M. Agr. dan keynote speech Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Arif Wachyunadi.

Pada *keynote speech* Gubernur Lemhannas RI, Arif Wachyunadi menyampaikan bahwa berlakunya sistem presidensiil di Indonesia berdampak pada Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang di mana Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) digantikan oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Selain itu, Arif Wachyunadi juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengukuran dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (LABKURTANNAS) pada Tahun 2016, indeks ketahanan gatra politik secara nasional memiliki skor 2.43 atau kurang tangguh. Hasil pengukuran tersebut, memberikan *early warning* (peringatan dini) kepada bangsa Indonesia terkait dengan kondisi politik Indonesia saat ini.

Arif Wachyunadi juga mengungkapkan hasil jajak pendapat Lemhannas RI tentang tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat strategis yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih diharapkan untuk mengatur kebijakan yang bersifat strategis.

Selanjutnya, dalam RTD yang dimoderatori oleh Laksda TNI Ir. Bambang Naryono, M.M. ini, salah satu Tim Perumus Naskah sementara kajian Lemhannas RI Laksda TNI Ir. Yuhastihar menyampaikan bahwa pokok-pokok persoalan adanya kajian reformulasi GBHN ini dikarenakan adanya pertanyaan mengenai

apa kelebihan dan kekurangan dari SPPN dan implikasi perubahan SPPN terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. selain itu, Yuhastihar juga memaparkan mengenai pro dan kontra mengenai adanya reformulasi GBHN tersebut.

Pro dan kontra yang muncul dalam reformulasi GBHN ini diamini oleh Ketua Badan Pengkajian MPR RI Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.. Bambang Sadono menyatakan walaupun wacana mengembalikan GBHN menimbulkan pro dan kontra namun sebagian besar menyetujui kembalinya GBHN. Hal tersebut dipaparkan dalam hasil kajian MPR RI yang menyatakan bahwa GBHN merupakan panduan arah dan strategi jangka pendek, menengah dan panjang.

Mengenai bentuk hukumnya, Bambang Sadono berpendapat Tap MPR yang paling tepat. Namun, Presiden dan Pejabat terkait yang tidak melaksanakan GBHN tidak akan dikenakan sanksi Hukum melainkan sanksi moral dan politik.

Selain itu, Bambang Sadono juga memaparkan mengenai hasil konfigurasi opini yang dilakukan MPR RI. Dalam konfigurasi tersebut, seluruhnya menyatakan setuju dengan adanya GBHN. Maka dari itu, sebagai jalan tengah, menurut Sadono GBHN dipecah menjadi dua, yaitu haluan negara sebagai kaidah penuntun secara makro (*State Policy*) ditetapkan oleh MPR yang berupa SPPN dalam Undang-Undang, dan Haluan Negara yang meliputi jangka waktu yang lebih jauh.

RTD tersebut kemudian dilanjutkan dengan paparan dari narasumber kedua yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Bambang Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.d., serta Pembahasan dari tiga penanggap yaitu ketua Dewan Penasehat Ikatan Alumni Lemhannas RI (IKAL) Dr. Bambang Kesowo, S.H.LL.M., Peneliti Senior LIPI Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., dan Direktur Eksekutif CSIS Phillips J. Vermonte.

Hadir dalam RTD tersebut para Tenaga Professional dan Tenaga Ahli Lemhannas RI, Pejabat Struktural Lemhannas RI, serta perwakilan Peserta PPRA Lemhannas RI. ●

# Asia Timur Berpotensi Menjadi Pusat Dunia



**P**akar Hubungan Internasional China, Prof. Yan Xuetong, mengatakan bahwa Asia Timur memiliki potensi untuk menjadi pusat dalam tatanan internasional yang terus berkembang. “Jumlah PDB China dan Jepang yang lebih besar dari PDB semua negara di Eropa dan juga pengeluaran anggaran militer kedua negara, dan penurunan kinerja Uni Eropa dalam memecahkan masalah keuangan membuat Asia Timur menjadi pusat dunia potensial,” kata Yan Xuetong yang mengunjungi Lemhannas RI dan melakukan diskusi dengan beberapa pejabat Lemhannas RI dan perwakilan PPRA LVI di Ruang Nusantara II, Lemhannas RI, Kamis (13/7).

Yan mengatakan bahwa konsep integrasi Uni Eropa pasca Brexit dan kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menarik diri dari tatanan internasional membuat gerakan anti kemapanan mendapatkan momentum. Tak pelak lagi, kecenderungan tatanan internasional berubah. Amerika Serikat, satu-satunya negara adidaya saat ini, melepaskan diri dari perannya di dunia internasional yang selama ini dijalaninya. Sedangkan model integrasi Uni Eropa yang sebelumnya dianggap positif, ternyata kini dinilai lamban dalam menghadapi krisis keuangan regional.

Mnurut Xuetong, kedaulatan negara yang dianggap tradisional saat integrasi teritorial semakin meningkat, akan

memainkan peran penting di masa depan. Sementara itu, Asia Timur dan Tenggara, adalah daerah yang stabil secara ekonomi dan relatif damai, meski belum memiliki arsitektur keamanan regional.

Itulah tantangan dalam perwujudan Asia Timur menjadi pusat dunia. Tidak adanya struktur rancangan keamanan regional membuat negara-negara di Asia Timur tidak saling sadar untuk membangun Asia Timur menjadi pusat tatanan dunia. Ini menjadi tugas masing-masing negara di kawasan ini.

Konflik Laut China Selatan yang telah terjadi dalam satu dasawarsa dan terus menguat, merupakan konflik perbatasan regional yang terjadi karena hubungan politik antar negara. “Masalahnya bukan batas negara, tapi hubungan politik (antar negara),” ucap Prof. Yan Xuetong.

Selama ini, China dan Indonesia melihat isu ini dari tingkat strategis, bukan dari pertimbangan lokal, namun dari pertimbangan politik masa depan dari perselisihan di sana. Tidak ada kesulitan dalam memecahkan masalah ini,” kata Yan Xuetong menjawab pertanyaan salah satu peserta diskusi yang dipandu oleh Deputy Pengkajian Strategis Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Djagal Wiseso Marseno, M.Agr, diskusi bertajuk “Evolusi Konstitusional Internasional” bersama Prof. Yan Xuetong berjalan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama. ●